BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dalam perjalanan sejarahnya, angkutan kereta api di tanah air membuktikan peranannya yang berarti pada sektor perhubungan disamping menunjang pertumbuhan ekonomi terutama disektor pertanian, perkebunan dan pertambangan.

Perkeretaapian di Indonesia mulai berperan sejak tanggal 17 Juni 1864, pada waktu itu Gubernur Jenderal Belanda *Mr. L.A Baron Sloet Van De beele* meresmikan lintasan kereta api Kemijen-Tanggung sepanjang 26 KM. Tiga tahun kemudian lintas ini dioperasikan oleh **NISM** *(Nederland Indishe Spoorwegh Maatchapy)*, sebuah perusahaan kereta api swasta milik pemerintah Hindia Belanda. Motivasi pendirian perusahaan ini oleh kolonial Belanda adala sebagai sarana logistik untuk kepentingan strategis peperangan dan untuk menunjang kebutuhan ekonomi kolonial Belanda. Kehadiran kereta api dalam lintas ini mengundang beberapa perusahaan kereta api lainnya untuk membuka jaringan jalan kereta api, sehingga terdapat kurang lebih 12 buah perusahaan kereta api milik swasta dan satu buah perusahaan kereta api milik pemerintah. Sampai akhir Perang Dunia II di Indonesia telah terdapat kurang lebih 6.458 jaringan jalan kereta api, dan pada tahun 1895 jaringan jalan kereta api telah tersebar di Jawa, Madura, Sumatera dan Sulawesi.

Pada masa pendudukan Jepang, seluruh jaringan kereta api milik Belanda (pemerintah swasta) dikuasai oleh Jepang dengan nama *"Ryuku Kyoko"* dan berubah menjadi *"Tetsudo Kyoko"* yang berkantor pusat di Bandung, sedangkan di Sumatera disebut *"Tetsudo Tai"* yang berkantor di Bukit Tinggi. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya tanggal 28 September 1945 di Balai Besar Bandung para pemuda yang tergabung dalam Angkatan Muda Kereta Api **(AMKA),** melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan dari tangan sekutu, sehingga tanggal tersebut dijadikan hari jadi kereta api.

Pada tanggal 27 September 1949 pemerinta Republik Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah No. 2 yang isinya menyatakan bahwa DKA RI dan SS/VS digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api **(DKA).** Dengan diundangkannya UU No. 19 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha milik Negara yang mengatur landasan hukum pendiriannya keudian dengan PP No. 22 tahun 1963, DKA berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api **(PNKA).**

Selanjutnya dengan PP No. 1 tahun 1971, maka bentuk usahanya dialihkan dari PNKA menjadi Perusahaan Jawatan **(PERJAN)** yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api **(PJKA).** Setelah berubah dari PNKA menjadi PJKA maka kurang dari 20 tahun kemudian yaitu pada tanggal 31 Oktober 1990 dengan PP No. 57 tahun 1990, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api **(PERUMKA)** yang ditandatangani oleh

Presiden Soeharto tanggal 30 Oktober 1990 maka status Perusahaan Jawatan diganti menjadi Perum.

Setelah melayani masyarakat umum dengan berbagai jenis pelayanan yang dilakukan maka 9 tahun kemudian Perusahaan Umum Kereta Api **(PERUMKA)** mengganti namanya PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Status baru tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan kondisi perusahaan dengan peningkatan pelayanan yang akan lebih baik lagi dari segi pelayanan teknis maupun operasional.

2.1.1. Visi, Misi dan Budaya Perusahaaan

Visi

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang focus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders.*

Misi

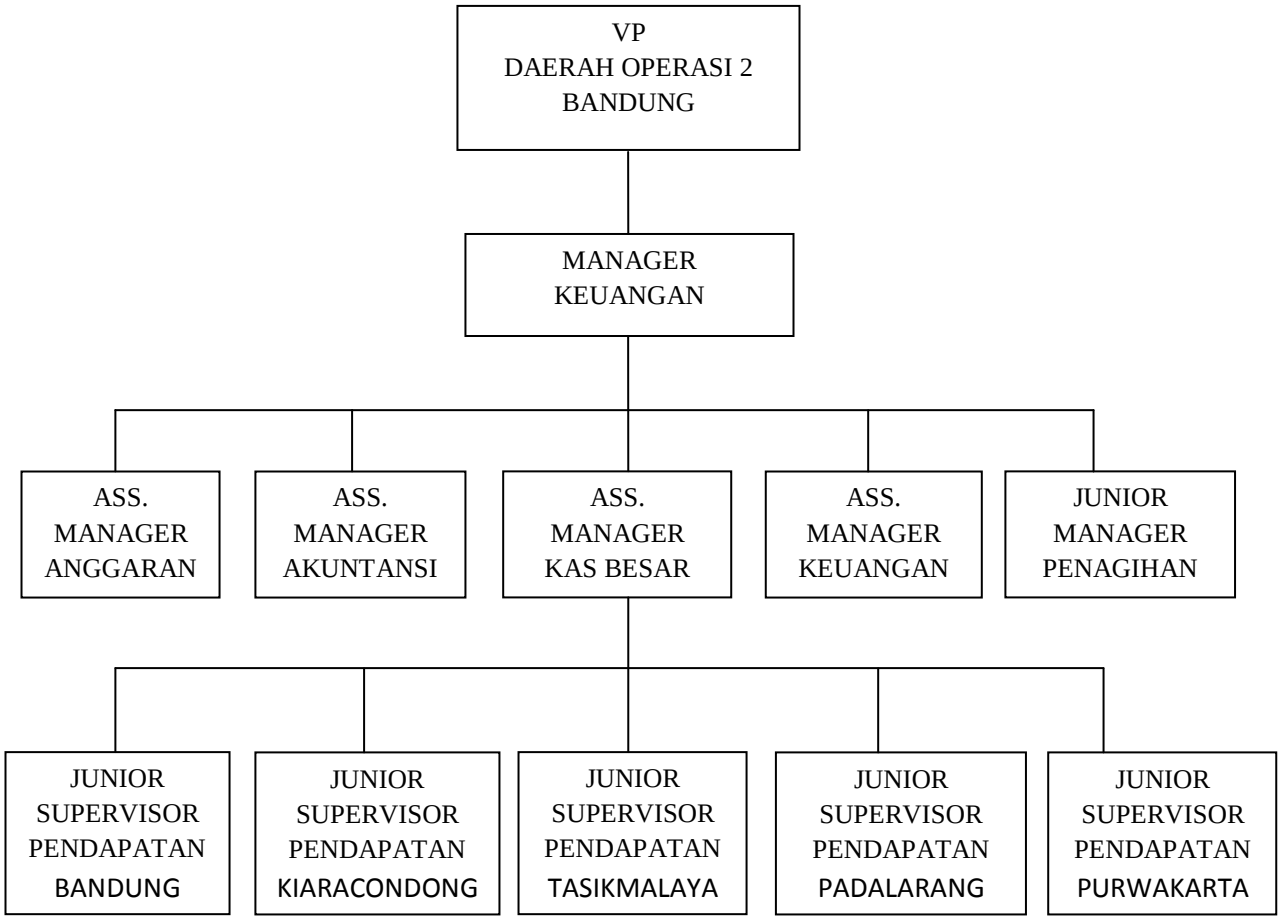
Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, waktu, pelayanan dan kenyamanan.

Budaya Perusahaan

5 nilai utama : Integritas, Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima

2.2. Struktur Organisasi

Bentuk stuktur organisasi yang dipakai oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 2 pada bagian Keuangan adalah bentuk struktur organisasi garis dan staf berdasarkan keputusan mentri perhubungan darat SK. Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) No.KEP.U/0T.003/I/12/KA-2012 terdiri atas :



Sumber : PT.Kereta Api Indonesia Daop 2

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Keuangan PT. Kereta Api Indonesia
DAOP 2 Bandung

2.3. Deskripsi Jabatan

- Manager Keuangan

a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yangberkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan kantor pusat, di wilayah daerah operasi 2 bandung,

b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di seksinya,

c. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran tahunan daerah operasi 2 bandung dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran,

d. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah operasi 2 bandung serta pembinannya,

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahaan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahaan pembayraan kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan,

f. Melaksanakan penagihan atas piutang angkutan penumpang, dangkutan barang dan pengusahaan asset (rekening G.125/SAB) serta tata usaha administrasi piutang,

g. Melaksanakan tata laksana perbendaharaan dan pengelolaan tata usaha perbendaharaan daerah operasi 2 bandung.

- Junior Manager Penagihan

  Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan penagihan atas piutang angkutan penumpang, angkutan barang dan pengusahaan asset serta tata usaha administrasi piutang.

- Assistant Manager Anggaran

  Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinasi penyusunan rencana kerja anggaran tahun daerah operasi 2 bandung, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.

- Assistant Manager Akuntansi

  Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah operasi 2 bandung.

- Assistant Manager Keuangan

  Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahaan pembayaran gaji pegawai dan non pegawai, pengesahaan pembayaraan kepada pihak ketiga, serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan.

- Assistant Manager Kas Besar

  Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menerima, menyimpan, mengeluarkan, mencatat transaksi kan dan serta kas

tunai atau pada rekening bank daerah di wilaya kerjanya dengan rincian tugas sebagai berikut :

a. Melaksanakan penerimaan uang yang berasal dari pendapatan non angkutan tunai atau melalui rekening bank daerah, pencairan piutang perusahaan dan droping BKU ke BD.
b. Melakasanakan pengeluaran untuk transaksi setoran pendapatan non angkutan baik yang diterima tunai maupun melalui rekening bank daerah, ke rekening bank koordinator daerah, pembayaran utang perusahaan melalui pengesahaan bukti pembayaraan (A.9) serta pembayaraan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan.
c. Melaksanakan penyimpanan uang tunai di brankas dan di bank daerah.

- Junior Supervisor Pendapatan Stasiun Bandung

  Mengelola pendapatan stasiun besar A bandung dan stasiun rayon, yang terdiri dari :

  1. Stasiun kelas 2 Ciroyom,
  2. Stasiun kelas 2 Cimahi,
  3. Stasiun kelas 3 Cikudapateuh,
  4. Stasiun kelas 3 Andir,
  5. Stasiun kelas 3 Cimindi.

- Junior Supervisor Pendapatan Stasiun Kiaracondong

  Mengelola pendapatan stasiun besar C Kiaracondong dan stasiun rayon, yang terdiri dari :

  1. Stasiun kelas 1 Gedebage,
  2. Stasiun kelas 1 Rancaekek,
  3. Stasiun kelas 1 Cicalengka,
  4. Stasiun kelas 2 Cibatu,
  5. Stasiun kelas 2 Cipeundeuy,
  6. Stasiun kelas 3 Cimekar,
  7. Stasiun kelas 3 Haurpugur,
  8. Stasiun kelas 3 Nagreg,
  9. Stasiun kelas 3 Lebakjero,
  10. Stasiun kelas 3 Leles,
  11. Stasiun kelas 3 Karangsari,
  12. Stasiun kelas 3 Warungbandrek,
  13. Stasiun kelas 3 Bumiwaluya.

- Junior Supervisor Pendapatan Stasiun Tasikmalaya

  Mengelola pendapatan stasiun besar C Tasikmalaya dan stasiun rayon, yang terdiri dari :

  1. Stasiun kelas 1 Banjar,
  2. Stasiun kelas 2 Ciamis,
  3. Stasiun kelas 3 Cirahayu,
  4. Stasiun kelas 3 Ciawi,

5. Stasiun kelas 3 Rajapolah,
6. Stasiun kelas 3 Indihiang,
7. Stasiun kelas 3 Awipari,
8. Stasiun kelas 3 Manonjaya,
9. Stasiun kelas 3 Bojong,
10. Stasiun kelas 3 Karangpucung.

- Junior Supervisor Pendapatan Stasiun Padalarang

  Mengelola pendapatan stasiun kelas 1 Padalarang dan stasiun rayon, yang terdiri dari :

  1. Stasiun kelas 2 Cianjur,
  2. Stasiun kelas 3 Cilame,
  3. Stasiun kelas 3 Sasaksaat,
  4. Stasiun kelas 3 Tagogapu,
  5. Stasiun kelas 3 Cipatat,
  6. Stasiun kelas 3 Cipeuyeum,
  7. Stasiun kelas 3 Ciranjang,
  8. Stasiun kelas 3 Cibeber,
  9. Stasiun kelas 3 Lampengan,
  10. Stasiun kelas 3 Cireungas,
  11. Stasiun kelas 3 Gandasoli.

- Junior Supervisor Pendapatan Stasiun Purwakarta

  Mengelola pendapatan stasiun kelas 1 Purwakarta dan stasiun rayon, yang terdiri dari :

  1. Stasiun kelas 2 Plered,
  2. Stasiun kelas 3 Cibungur,
  3. Stasiun kelas 3 Ciganea,
  4. Stasiun kelas 3 Sukatani,
  5. Stasiun kelas 3 Cisomang,
  6. Stasiun kelas 3 Cikadongdong,
  7. Stasiun kelas 3 Rendeh,
  8. Stasiun kelas 3 Maswati.

2.4. Aspek Kegiatan Perusahaan

Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang aktivitas PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai berikut :

1. Kedudukan

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah BUMN lingkungan Departemen Perhubungan yang dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab pada Menteri Perhubungan.

Menteri Perhubungan untuk selanjutnya melakukan pembinaan terhadap PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dibantu oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Menteri

Perhubungan. Dewan pengawas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggungjawab kepada menteri Perhubungan dan melakukan pengawasan rencana kerja dan anggaran PT. Kereta Api Indonesi (Persero) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tugas

Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 8 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tingkat Pusat Bab 1 Pasal 2, PT. Kereta Api Indonesia mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengusahaan pelayanan jasa kereta api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan atau barang secara missal guna menunjang pembangunan nasional.

3. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mempunyai fumgsi sebagai berikut :

- Penyediaan, pengoperasian, pendayagunaan, pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana angkutan bukan diatas jalan yang merupakan kelanjutan dari kereta api.
- Pemeliharaan, perbaikan, dan pendayagunaan prasarana jalan, rel, jembatan, terowongan, instalasi sinyal aliran, serta menyediakan dan pendayagunaan stasiun, bangunan stastiun, bangunan depu, serta bangunan gedung lainnya

- Pengoperasian, pendayagunaan, pengendalian pengusahaan stasiun pemberangkatan, penurunan dan atau angkutan penumpang maupun barang serta jasa lainnya yang terkait.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan yang dalam kegiatan usahanya mempunyai sifat menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum disamping untuk mendapatkan keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Maksud dan Tujuan perusahaan adalah mengusahakan pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka memperlancar penumpang dan arus barang secara massal untuk menunjang pembangunan nasional.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung bergerak dibidang usaha transportasi perkeretaapian, adapun bidang usaha perusahaan adalah penjualan atau pemasaran angkutan berupa :

a) Angkutan penumpang

Jenis angkutan penumpang :

- KA Lokal.
- KA Penumpang Ekonomi.
- KA Penumpang Bisnis.
- KA Penumpang eksekutif.

b) Angkutan Barang

Angkutan Baranmg terdiri dari :

- Angkutan Negosiasi yang terdiri dari :

Angkutan baja dari Cilegon ke Waru, angkutan BBM dari Rewulu ke Madiun, angkutan perkebunan di ESU, angkutan batubara di ESB dan Surabaya.

- Angkutan non negosiasi

Angkutan peti kemas dan KA Barang Cepat.

Lapangan usaha PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung berdasarkan PP No. 57 tahun 1990 pasal 7 adalah :

a. Penjualan atau pemasran jasa angkutan penumpang, barang pendukung angkutan dan usaha lain.
b. Produksi pengoperasian kereta api.
c. Perawatan, pembangunan, dan pendayagunaan prasarana, yang meliputi lokomotif dan gerbong.
d. Perawatan, pembangunan dan penadyangunaan prasarana, yang meliputi rel kereta api.
e. Pendayagunaan personil.
f. Pengelolaan dan pendayagunaan keuangan.
g. Secara terus-menerus melakukan perbaikan dan penyesuaian sistem dan metode pengelolaan perusahaan.